

MODEL PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PUSAT INFORMASI MANGROVE

Nurhikmah Esti Prastika, Djauhar Edi Purnomo, Muhammad Fithrayudi Triatmaja

STIE Muhammadiyah Pekalongan

ABSTRACT

THIS STUDY AIMS TO IDENTIFY AND ANALYZE A MODEL OF ENGAGEMENT THAT CAN BE REALIZED BY THE COMMUNITY IN THE MANAGEMENT OF TOURISM BY THE PUBLIC AND OTHER INTERESTED PARTIES. THIS STUDY DESCRIBES A MODEL OF COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN MANGROVE INFORMATION CENTER PEKALONGAN CITY. THIS STUDY IS A QUALITATIVE RESEARCH. POPULATION IN THIS STUDY IS THAT PEOPLE WHO ARE AROUND THE OBJECT PEKALONGAN MANGROVE PARK IS THE ENTIRE LENGTH OF VILLAGE RESIDENTS NEW AND LONG CAGE. RESPONDEN NUMBER OF 100 RESPONDENTS CONSISTING OF A GROUP OF RESPONDENTS (STAKEHOLDER / OFFICIAL IN AN INSTITUTION AS MUCH AS 8 RESPONDENTS, EMPLOYERS AROUND PIM MUCH AS 2 RESPONDERS AND THE SURROUNDING COMMUNITY PIM MANY AS 90 RESPONDENTS). RESULTS FROM THIS STUDY IS THAT THE MODELS USED ARE MOSEL PELITABATAN COLLABORATIVE PARTNERSHIPS BETWEEN GOVERNMENT, COMMUNITIES AND EMPLOYERS AS WELL AS DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF PARTNERSHIPS IN THE MANAGEMENT OF MANGROVE PARK PEKALONGAN.

Keywords : Models of community engagement, development of ecotourism, mangrove information center.

PENDAHULUAN

Pekalongan sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai utara jawa memiliki potensi wisata. Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, pengembangan kawasan ini dengan cara memaksimalkan potensi wilayah mangrove itu sendiri dengan memanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan (*development*) seperti industri dan pariwisata. Pengembangan untuk kegiatan di atas memberi dampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya. Kegiatan pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan fungsi ekosistem pesisir dan lautan.

Pekalongan Mangrove Park terletak di pantai utara Pekalongan, berdekatan dengan obyek wisata Pasir Kencana Pekalongan menyajikan suatu konsep wisata pesisir pantai yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan, dan konservasi alam. Pemandangannya serta model wilayah yang unik sehingga dapat dikembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan mangrove.

Berlokasi di Kelurahan Kandang Panjang, Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kawasan ini semula adalah lahan tambak udang milik Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan yang sudah tak produktif lagi dan akhirnya dikembangkan sebagai kawasan konservasi sekaligus tempat edukasi & wisata alam dan kawasan wisata. Luas Rencana pembangunan taman mangrove 90 Hekta Sarat ini Luas Terbangun 5,7 Hektar dan akan dikembangkan 84,3 Hektar.

Berdasarkan data survei yang telah dilakukan di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara kelurahan tersebut memiliki luas wilayah 150.150 Ha dan 90 Ha akan digunakan untuk perluasan mangrove dan hal ini berarti pembangunan Pusat Informasi mangrove akan memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat disekitar Pusat Informasi Mangrove tersebut. Kelurahan kandang Panjang memiliki total penduduk sebanyak 13.592 Jiwa dimana kurang dari setengah jumlah penduduknya bermata pencaharian buruh/swasta 6.894 jiwa, dan jumlah penduduk miskinnya sebesar 3.485 kepala keluarga (Data Profil Kelurahan 2015)

Dengan demikian Pengembangan Pusat Informasi mangrove diharapkan mampu mendorong penguatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, baik secara sosial-budaya maupun ekonomi. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan model pembangunan yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk ikut mengelola sumber daya pariwisata dengan keterlibatan penuh dari masyarakat. Seperti yang telah tercantum dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan dan menjadikan potensi alam wisata yang ada di Indonesia sebagai salah satu sektor yang dapat mendatangkan devisa bagi negara dan masyarakat. Pengembangan wisata sendiri tentunya melalui beberapa tahapan dari tahapan (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengelolaan atau pemanfaatan, (4) menikmati hasil dan (5) evaluasi. Semua tahapan tersebut tidak terlepas dari adanya peran atau kontribusi yang diberikan oleh beberapa pihak terutama masyarakat sekitar kawasan wisata. Hal ini menandakan bahwa ada atau tidaknya partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu kunci penting dari suatu keberhasilan program pengembangan wisata di suatu kawasan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata sering menimbulkan perbedaan yang kontras antara masyarakat disekitar wilayah wisata dengan pengelola wisata tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Pembangunan pariwisata Harus mampu memberi manfaat secara adil bagi semua lapisan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata sesuai dengan peran yang dilakukannya. Dampak positif perkembangan kepariwisataan adalah dengan adanya Peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur/fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata dan Partisipasi masyarakat merupakan basis utama pariwisata berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat melindungi seluruh kepentingannya. Pembangunan Obyek Wisata Mangrove ini diharapkan dapat mewujudkan suatu rencana yang terpadu mengenai pencegahan bencana tepi pantai berupa pembudidayaan tumbuhan bakau yang terencana dan ciptakan area wisata yang berkualitas dan mampu memberi dampak positif bagi kawasan tersebut baik berupa keterlibatan langsung masyarakat maupun dampak tidak langsung bagi perekonomian masyarakat sekitar, baik sumber daya alam maupun budayanya oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata di Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan”. Dengan rumusan masalah Bagaimana Model Pelibatan Masyarakat yang dapat dilakukan di Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pelibatan

Peran serta masyarakat (berdasarkan PP 69/1996 dan Permendagri 8/1998) berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam Pengertian lain pelibatan adalah pelibatan masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan ruang perkotaan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat maupun swasta, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar memberikan hasil dan manfaat yang optimal dan menekan dampak buruk. Terdapat dua bentuk pelibatan

Yang pertama adalah Pelibatan pasif dimana masyarakat pasif dalam pengambilan keputusan kebijakan pemanfaatan ruang oleh pemerintah, yang biasanya di jalan melalui komunikasi satu arah, misalnya pelibatan melalui pemberian informasi, masukan atau jawaban, dan yang kedua adalah Pelibatan aktif dimana masyarakat secara aktif *bersama* pemerintah merancang atau melaksanakan kebijakan, program atau proyek, termasuk dalam hal sumber daya, yang biasanya dilakukan melalui komunikasi dua arah.

Tujuan Pelibatan Masyarakat

Adapun Tujuan Pelibatan Masyarakat ini adalah :

- a. Menjamin hak masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pihak lain, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
- b. Memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang memberikan dampak dan/atau manfaat.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta

Prinsip-Prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat

Adapun Prinsip-Prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat ini adalah :

- a. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang;
- b. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang;
- c. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
- d. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
- e. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Bentuk Pelibatan

Terdapat berbagai kemungkinan bentuk pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan, mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif (lihat tabel 2.4.2), atau dapat dikatakan, mulai dari memberikan masukan, diajak konsultasi sampai ikut memutuskan dalam proses kebijakan publik.

Akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat setempat untuk menentukan bentuk pelibatan mana yang paling sesuai dan sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat, swasta diperlukan. Namun demikian terdapat beberapa bentuk pelibatan utama yang dapat didorong penyelenggaraannya oleh pemerintah, yaitu:

1. Memberikan dan membuka akses terhadap informasi.
2. Membuka akses terhadap masukan.
3. Membuka akses terhadap komplain atau keberatan atau pengaduan.

4. Membuka kesempatan melakukan konsultasi atau mediasi atau pengambilan keputusan bersama.
5. Membuka kesempatan untuk mengawasi pelaksanaan.

Pendekatan Co-Management

Co-Management atau pengelolaan bersama merupakan paradigma yang sedang berkembang dengan pesat dalam pengelolaan sumber daya alam dimana Ruang terbuka hijau merupakan lahan konservasi yang perlu pengelolaan bersama (kemitraan) antara pemerintah, masyarakat dan stake holder. *Co-management* juga dinamakan pengelolaan kolaboratif, pengelolaan partisipatif atau pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan partisipatif didasarkan pada tiga bagian utama (Wells, et al.,1992):

- Semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin komitmen dan partisipasi mereka dan untuk menampung pengetahuan, aspirasi dan pengalaman mereka dalam pengelolaan.
- Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam pengelolaan berbeda-beda tergantung kondisi khusus dari tiap kawasan. Dalam beberapa kasus, kewenangan lebih banyak pada lembaga masyarakat, pada kasus yang lain kewenangan lebih banyak pada instansi pemerintah.

Kerangka kerja pengelolaan tidak hanya untuk tujuan ekologis konservasi, melainkan juga mencakup tujuan-tujuan ekonomi, social dan budaya. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kebutuhan mereka yang tergantung terhadap sumberdaya, keseimbangan dan partisipasi.

Manfaat adanya *co-management* menurut Wiyanto (pada Workshop Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek,2004) akan terwujud bila selaras dengan proses dan tujuannya,yaitu:

- a. Untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang bertumpu pada prakarsa dan kemampuan masyarakat
- b. Untuk mengalihkan kewenangan dalam menetapkan keputusan pengelolaan sumber daya
- c. Sebagai cara untuk mengurangi terjadinya perselisihan melalui keikutsertaan seluruh pihak yang terlibat secara demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan tentang Model Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata di Pusat Informasi Mangrove Kota Pekalongan. untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh *Bagdan dan Taylor* dalam buku "metodologi penelitian kualitatif" adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan diperilaku yang dapat diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam menggunakan peneletian populasi, yakni penelitian yang memakai objeknya dengan mengambil sampel dari populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada disekitar obyek Pekalongan *Mangrove Park* yaitu seluruh warga Kelurahan Panjang Baru dan Kandang Panjang. Untuk memperoleh sampel yang benar-benar representatif dengan kesempatan yang sama bagi seluruh populasi yang menjadi sampel, maka teknik sampling yang digunakan teknik sampling tertuju (*purposing sampel*) pada pihak pemerintah, masyarakat warga kampung dan pengusaha sekitar pantai. Teknik ini juga sebagai sampling pertimbangan (Nasution ,2002:20), karena pengambilan sample dilakukan

berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Penggunaan teknik sampling ini dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Responden

No	Kelompok Responden	Sasaran dalam Kelompok Responden	Jumlah Responden (Orang)	Keterangan
1	Stakeholder	Pejabat dalam Institusi: Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Pariwisata Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Panjang Baru	2 2 2 2	
2	Pengusaha	Pengusaha tempat makan dan minum di sekitar wilayah	2	
3	Masyarakat	Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Panjang Baru	45 45	
	Jumlah		100	

Data Penelitian

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diambil dari lokasi atau lapangan atau lapangan (dari sumbernya) dan masih memerlukan analisa lebih lanjut yang terdiri dari :

- Pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi permasalahan serta apa yang terjadi di lapangan.
- Kuesioner dan Wawancara. Terkait dengan Wawancara, pada penelitian ini proses wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait dan membaginya dalam dua tipe wawancara. Yang pertama adalah wawancara yang dilakukan kepada Informan, dimana informan ini dipilih berdasarkan kriteria berikut ini :
 1. Informan merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan PIM.
 2. Informan merupakan pengelola PIM saat ini.

Dari Hasil wawancara dengan Informan, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan kelompok sampel dari populasi yang telah dipaparkan diatas dengan kriteria :

1. Warga Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan wilayah Penelitian
2. Warga Masyarakat usia produktif

Adapun pedoman wawancara yang dilakukan dengan melihat aspek-aspek terkait yaitu Kelembagaan dari Pusat Informasi Mangrove, Partisipasi dan pelibatan masyarakat, Representasi masyarakat yang dilibatkan, Bimbingan teknis /pendampingan serta perlunya keberadaan forum.

Data Sekunder

Pengumpulan data Sekunder ini dilakukan dengan kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian dengan mencari buku/ sumber informasi lain yang relevan, guna memperkuat landasan teori penelitian. Penelitian ini dengan survei instansional yang terkait diantaranya pemerintah, data sekunder diperoleh untuk mendukung analisis yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove. Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah data tentang dasar kebijakan dari pembangunan PIM, Sejarah berdirinya Pim, Master Plan Pim, letak geografi, Data ini diperoleh dari dokumentasi organisasi yang berhubungan dengan data tersebut dan data -data yang lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan,2002:83). Dalam upaya mengumpulkan data yang relevan dengan obyek studi, maka teknik yang digunakan adalah Wawancara, Observasi Dokumentasi

Teknik Penskalaan

Metoda pengukuran digunakan disini menurut skala likert, metode rating yang dijumlahkan (*summated rating*) atau yang lebih di kenal dengan nama penskalaan model **Likert** merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Pada tahun 1932 *Rensis Likert* mengembangkan teknik ini untuk mengukur sikap masyarakat (Nasution 2002:61-64 dan Nazir, 1988:396-398).

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala *Likert*, dimana skala pengukuran ini akan mengurutkan dalam tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi menurut atribut tertentu tanpa memberi nilai absolut. Dalam skala ini respon subyek terhadap obyek (pernyataan) dibagi atas lima kategori jawaban yang menunjukkan derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan.

Nilai-nilai yang diberikan adalah: 1,2,3,4 dan 5. Nilai tertinggi diberikan terhadap kategori jawaban yang sesuai dengan persoalan yang diteliti, sedangkan nilai terendah diberikan terhadap jawaban yang tidak sesuai dengan persoalan penelitian. Untuk pertanyaan/pernyataan yang bersifat negatif, digunakan penilaian kebalikannya

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (1994:103) adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan. Penelitian diarahkan pada tindak lanjut setelah pengumpulan data untuk memperoleh studi.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*). Menurut Nasution dalam Sugiyono (2010:334) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.

Dalam tahap ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan diantaranya sebagai berikut:

Deskriptif

Dimana menganalisa keadaan obyek penelitian melalui uraian, pengertian/penjelasan baik terhadap analisis yang bersifat terukur/ yang tidak terukur. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan nantinya serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pendekatan kemitraan yang ada.

Normatif

Analisa terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu kondisi ideal tertentu, kondisi tersebut dapat merupakan suatu standar yang ditetapkan oleh instansi tertentu maupun landasan hukum/diambil dari studi literatur pada beberapa negara lain yang telah berhasil menjalankan program-program pengelolaan lingkungan. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana kondisi yang seharusnya berjalan pada wilayah studi. Dalam hal ini terkait dengan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan dasar obyektifitas hasil yang dicapai dalam penelitian untuk memeriksa data yang dikumpulkan. Dalam penelitian tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan untuk menghindari kesalahan data yang peneliti simpulkan, maka peneliti memeriksa kembali terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini peneliti lakukan untuk menghindari dari kesalahan dan ketidakbenaran data. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam pemeriksaan data dalam penelitian ini adalah :

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur - unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor -faktor yang menonjol, kemudian di telah untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara relatif dan penelahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

b. Triangulasi

Dari tahap ketekunan diatas, peneliti juga menggunakan model triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Dalam penelitian ini melakukan triangulasi dengan menggunakan perbandingan teori triangulasi dengan sumber berarti peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

Pada metode ini, triangulasi dapat diperoleh dengan berbagai cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa dikatakan orang terhadap situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat (awam), orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap model pengelolaan yang dapat diterapkannya dalam pengelolaan Pusat Informasi Mangrove atau Pekalongan Mangrove park adalah kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Seluruh komponen stakeholder yang ada perlu dilibatkan secara maksimal mengingat permasalahan-permasalahan lingkungan pantai tidak hanya dapat ditangani oleh satu lembaga, tetapi harus dilaksanakan secara terintegrasi.

Kesamaan Pandangan Masyarakat dan Pemerintah

Dalam mengelola PIM perlu kiranya partisipasi masyarakat secara optimal merupakan suatu aset sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna memelihara hutan mangrove. Dalam hal ini masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi obyek melainkan dapat menjadi subyek dalam program-program pengelolaan lingkungan. Dengan demikian akan tumbuh perasaan memiliki dan dengan sukarela akan menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Untuk melihat persepsi masyarakat dalam mengelola dapat diketahui dari minat mereka untuk mengelola PIM.

Dari pandangan dan responsi masyarakat di wilayah Pekalongan Mangrove Park dalam mengelola Pekalongan Mangrove Park tingkat minat masyarakat dalam mengelola Pekalongan mangrove Park cukup tinggi didapat dari data distribusi frekuensi masyarakat pesisir yang sangat berminat mengelola pantai sebanyak 12 responden atau sebesar 13%, dan untuk yang berminat sebanyak 69 responden atau sebesar 76%. Dengan demikian sangatlah penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pelibatangannya dalam program-program pengelolaan Pekalongan mangrove Park.

Komitmen dan Kontribusi dari Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan PIM.

Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan di Pusat Informasi mangrove di lokasi penelitian hendaknya memenuhi beberapa karakteristik pelibatan seperti:

- a. Adanya sifat saling melengkapi antara pelibatan secara perorangan dan kelompok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuannya untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) yang membutuhkan pemahaman dan kesepakatan kolektif dari semua stakeholder yang berkepentingan.
- b. Pelibatan secara perorangan dan kelompok/forum dilakukan secara berkesinambungan sejak awal sampai pengawasan.
- c. Mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dimana paparan masalah riil, ide serta diskusi dalam rangka pemecahan masalah hendaknya lebih didominasi masyarakat, sementara pihak Pemerintah Kota lebih berperan sebagai fasilitator.

Kesinambungan Pelibatan Aktif Masyarakat

Aspek yang diukur dari karakteristik ini adalah kondisi yang menggambarkan komitmen pemerintah Kota untuk mengikutsertakan masyarakat secara perorangan dan kelompok/ forum sejak awal hingga pengawasan. Artinya pelibatan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok hendaknya dilakukan secara rutin/ terus menerus dalam setiap tahapan pengelolaan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan aktif masyarakat diukur dari penguasaan masyarakat terhadap masalah pengelolaan dan keaktifannya dalam forum lokal berlangsung. Artinya paparan permasalahan riil, ide perencanaan dan pengelolannya dapat di diskusikan secara rutin/ terus menerus dalam rangka pemecahan masalah hendaknya lebih di dominasi masyarakat, sementara pihak pemerintah kota lebih berperan sebagai fasilitator.

Mencermati hasil analisis komitmen dan kontribusi dari masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan PIM, maka penulis ingin menyimpulkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan PIM belum memenuhi karakteristik pelibatan yang diharapkan. Hal ini ditujukan pada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Pelibatan masyarakat belum saling melengkapi

Hal ini diindikasikan oleh pengakuan 54% masyarakat bahwa hingga penelitian ini dilakukan, mereka tidak pernah mengetahui informasi Pelibatan pengelolaan PIM serta tidak pernah dilibatkan dalam aktifitas perencanaan dan pengelolaannya. Sementara itu 10% warga masyarakat yang pernah dilibatkan mengatakan bahwa pelibatan mereka hanya dalam kapasitas sebagai perorangan dan tidak pernah sebagai wakil kelompok (baik forum lokal ataupun baru). Indikasi lainnya ialah bahwa selama aktifitasnya selain tidak melibatkan forum lokal, Pemerintah Kota juga tidak pernah membentuk forum baru sebagai wadah pelibatan masyarakat.

b. Masih pasifnya pelibatan masyarakat.

Hal ini diindikasikan oleh kondisi dimana pelibatan masyarakat hanya dilakukan secara perorangan, dan dominannya peranan Pemerintah Kota dalam pemaparan masalah riil, sumber ide perencanaan dan pengelolaan serta diskusi dalam rangka pemecahan masalah. Dominasi pemerintah bersifat *Top-down* dimana kehadiran masyarakat hanyalah sebagai pendengar pasif yang lebih ditujukan untuk melegitimasi hasil perencanaan yang ada ketimbang ikut dilibatkan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.

Peluang Pengembangan dalam Pengelolaan PIM

Dalam UU No.23/1997 menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah yaitu membentuk suatu kemitraan bersama-sama masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan. Dukungan dari pihak pemerintah sebagai lembaga formal dalam proses menuju kemitraan sangat diperlukan mengingat pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam menentukan kebijakan suatu wilayah pemerintahan yang transparan dan tidak berpihak akan mendorong terciptanya kemitraan yang baik. Walaupun dalam kemitraan kedudukan aktor pelakunya sejajar, namun dukungan dari pemerintah merupakan dorongan/ motivasi terbentuknya kemitraan.

Dari kenyataan tersebut peneliti memandang perlu kiranya Pemerintah Kota Pekalongan merubah strategi pengelolaan PIM tersebut dengan menerapkan pola pendekatan *Co-Management* (kemitraan) karena masyarakat juga menghendaki adanya pengelolaan PIM secara maksimal, akan tetapi keterbatasan dana dan tidak teraspirasinya pendapatnya sehingga perlu adanya mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Pengusaha di sekitar area pantai juga berusaha membantu apabila Pemerintah Kota memfasilitasi serta mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan dari para pengusaha tersebut. Pola dari *co-management* (kemitraan) juga melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tindak kerja, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sebagai salah satu respon terhadap dominasi pendekatan pembangunan model top down. Pelaksanaan program yang bercirikan manajemen partisipatif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat sehingga program dimaksud memperoleh dukungan dari masyarakat.

Melalui pola kemitraan diantara masyarakat lokal, pemerintah lokal, serta swasta guna meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga memunculkan rasa tanggungjawab dan keinginan untuk melestarikan ekosistem mangrove. Model pelibatan masyarakat yang akan dikembangkan tidak hanya bertujuan meningkatkan dan memelihara lingkungan ekosistem mangrove, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Model pelibatan masyarakat dengan kemitraan pada umumnya hanya mengikuti sebuah model umum dengan beberapa variasi intensitas peran Pemerintah daerah setempat, model yang lazim dijumpai adalah masyarakat membentuk sebuah lembaga pengelola, yang hanya terdiri atas wakil-wakil masyarakat pemangku kepentingan tanpa adanya wakil pemerintah didalam lembaga. Lembaga pengelola berfungsi sebagai wakil masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan dan sekaligus melaksanakan implementasi dari rencana yang disepakati dalam rapat pleno. Lembaga pengelola juga mendapat mandat dari masyarakat untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disepakati.

Dari kedua model yang disajikan tidak bisa dinyatakan model mana yang lebih baik. Masyarakat pesisir mempunyai adat dan kebiasaan yang sangat bervariasi. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pun berbeda-beda. Karena tidak ada satu resep untuk semua lokasi. Tetapi resep umum mungkin masih bisa coba diusulkan berdasarkan pengalaman. Dalam lembaga pengelolaan tersebut sebaiknya tidak diformalkan sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pos atau kantor secara khusus. Keberadaan kantor atau pos lembaga pengelolaan bisa lebih mempersulit kinerja pengurus lembaga. Lembaga pengelola sebaiknya diperlakukan sebagaimana lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Karena biasanya kedua lembaga ini tidak mempunyai pos atau kantor khusus sehingga tidak ada kewajiban bagi pengurusnya untuk selalu masuk kantor. Hal ini perlu diperhatikan karena mereka memang tidak mendapat upah dan gaji secara rutin, dan mereka juga tidak mempunyai tugas rutin setiap hari.

Model Pelibatan

Model Pelibatan Masyarakat yang dapat di implementasikan untuk mengelola Pusat Informasi Mangrove adalah Konsep kemitraan, dimana masing – masing stakeholder dapat terlibat bersama sama. Model Pelibatan konsep kemitraan ini dibagi menjadi dua yang terkait dengan lingkungan dan vegetasi mangrove serta pariwisata. Untuk pelibatan terkait dengan lingkungan dan vegetasi mangrove masyarakat dapat dilibatkan dalam hal:

1. Kegiatan-kegiatan pendidikan lingkungan hidup
2. Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem Mangrove
3. Berpartisipasi dalam pembuatan konsep rencana pengelolaan
4. Menentukan kelompok inti/kelompok perencanaan Pengambil keputusan dan pemberi masukan dalam rencana pengelolaan mangrove (klarifikasi isu, visi desa, tujuan pengelolaan, strategi, kegiatan, sistem monitoring, dan struktur kelembagaan)
5. Menentukan isu prioritas, tujuan pengelolaan, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta waktu pelaksanaan.
6. Bermusyawarah untuk persetujuan rencana pengelolaan, dan pendanaan
7. Memberi dukungan legitimasi rencana pengelolaan melalui SK Kepala Desa tentang Penetapan Rencana Pengelolaan Dan Penetapan Kelompok Pengelola Dan Pelaksana Rencana Pengelola.
8. Menentukan anggota kelompok Pengelola

Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi secara aktif pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan

Adapun model pelibatan yang terkait dengan pariwisata dapat dijelaskan Berdasarkan apa yang akan dikembangkan di Pusat Informasi Mangrove:

1. Pengembangan potensi wisata air (kapal feri, dan perahu tradisional), aspek-aspek yang dibutuhkan didalamnya adalah:
 - Penyediaan dana (modal) untuk kebutuhan pengembangan wisata air
 - Pembangunan dermaga

- Penyediaan perahu Mesin
- Penyediaan Perahu tradisional
- Penyediaan bahan bakar
- Pemandu atau Instruktur pengoperasian perahu tradisional
- Regu penyelamat kegiatan kapal peri, dan perahu tradisional
- Teknisi/montir jetsky, kapal peri dan perahu tradisional
- Promosi daya tarik wisata air kapal peri perahu tradisional

Sedangkan kebutuhan pengembangan potensi wisata yang dimitrakan adalah pemandu atau instruktur, regu penyelamat, penyedia perahu tradisional, dan teknisi/montir. Dalam model tersebut peran dari masyarakat adalah sebagai colon tenaga kerja yang dipersiapkan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan serta mengikuti segala proses dalam model kemitraan tersebut. Sedangkan peran lembaga pengelola kawasan wisata berawal dari pengangkatan para calon tenaga kerja yang dibutuhkan, memberikan pelatihan kepada para calon tenaga kerja, serta menyediakan berbagai kebutuhan pada setiap kebutuhan yang dimitrakan. Sedangkan model pelibatan yang terbentuk pada wisata air ada dua bagian

- a. Model kemitraan setara (seimbang) pada kebutuhan penyediaan perahu dan montir perahu.
 - b. Model kemitraan peran serta yaitu pada kebutuhan instruktur dan kebutuhan regu penyelamat.
2. Hal-hal yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata pemancingan adalah sebagai berikut:
- Penyediaan dana (modal) untuk kebutuhan pengembangan wisata pemancingan
 - Pembangunan tempat pemancingan
 - Penyediaan ikan yang akan dipancingkan
 - Penyediaan tenaga kerja pengelola wisata pemancingan
 - Pembangunan kolam ikan
 - Penyediaan peralatan pancing
 - Penyediaan pakan ikan
 - Promosi daya tarik wisata pemancingan ikan.

Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, aspek yang dimitrakan hanya aspek kebutuhan penyediaan ikan saja. Dalam model pelibatan tersebut peran dari masyarakat adalah sebagai peternak ikan, mulai dari pembenihan, peternakan, penyortiran, hingga dihasilkannya ikan-ikan yang siap untuk dipancingkan. Sedangkan peran dari lembaga pengelola kawasan pariwisata adalah sebagai pemberi pinjaman modal serta pembeli ketika ikan siap untuk dijadikan sebagai ikan pemancingan. Sedangkan model kemitraan yang terbentuk adalah peran yang setara (seimbang).

3. Potensi wisata restoran terapung mempunyai kebutuhan-kebutuhan pengembangan potensinya, berikut ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.
 - Penyediaan dana (modal) untuk kebutuhan pengembangan wisata restoran terapung
 - Pembangunan restoran terapung
 - Pemilihan hidangan yang akan dijadikan menu restoran
 - Penyediaan bahan yang akan dijadikan menu hidangan
 - Penyediaan koky (tukang masak)
 - Pengelolaan restoran terapung termasuk penyediaan tenaga kerja di restoran
 - Promosi wisata restoran terapung kepada publik.

Sedangkan kebutuhan yang kemitraan adalah tenaga pengelolaan restoran. Sedangkan di dalam model peliatan tersebut peran masyarakat adalah sebagai tenaga kerja sekaligus sebagai pengelola restoran yang mengelola operasional restoran. Sedangkan peran lembaga pengelola kawasan pariwisata adalah memberikan fasilitas restoran terapung yang dibutuhkan dan memanagemen kegiatan yang dilakukan dalam restoran tersebut.

4. Pengembangan potensi wisata *outbound*, aspek-aspek dibutuhkan adalah:

- Penyediaan modal untuk pengembangan wisata *outbound*
- Penyediaan lahan untuk kebutuhan kegiatan *outbound*
- Penyediaan semua perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan *outbound*
- Penyediaan instruktur *outbound* dan penyediaan tenaga kerja *outbound*
- Promosi wisata kepada public

Sedangkan kebutuhan dimitrakan adalah penyediaan instruktur *outbound*. Dalam model pelibatan ini peran masyarakat adalah sebagai tenaga yang disiapkan untuk instruktur *outbound*. Sedangkan peran dari lembaga pengelola adalah memberikan fasilitas dan memberikan segala perlengkapan yang dibutuhkan para instruktur.

KESIMPULAN

Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan di Pusat Informasi mangrove di lokasi penelitian hendaknya memenuhi beberapa karakteristik pelibatan seperti:

1. Adanya sifat saling melengkapi antara pelibatan secara perorangan dan kelompok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuannya untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) yang membutuhkan pemahaman dan kesepakatan kolektif dari semua stakeholder yang berkepentingan.
2. Pelibatan secara perorangan dan kelompok/forum dilakukan secara berkesinambungan sejak awal, pengelolaan sampai pengawasan.
3. Mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dimana paparan masalah riil, ide serta diskusi dalam rangka pemecahan masalah hendaknya lebih didominasi masyarakat, sementara pihak Pemerintah Kota lebih berperan sebagai fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin, 2002, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahagia, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam rehabilitasi Hutan Mangrove Pasca tsunami di kecamatan Baitusalam 2008. Universitas Sumatera utara. 2009.

Bambang Wijanarko, Kemungkinan Penerapan Co Management Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Pantai Utara kota. Thesis Unversitas Diponegoro. 2006.

Budiati, Lilin, 2000, Manajemen Partisipatif dalam Pengelolaan Lingkungan Studi Kasus di Sungai Babon Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Managemen. Universitas Diponegoro. Semarang.

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

- Dewi, M.H.U., 2004, Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Tiga Desa Kawasan Wisata Lovina, Denpasar: Lembaga Penelitian, Universitas Udayana.
- Dias Satria, Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Eka Desi Yulia. 2014, Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata. Institut Pertanian Bogor.
- Frida Purwanti. 2008, Konsep Co-Management Taman Karimun Jawa. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Gilbert, Alan et al. 1984. Community Anticipation in Upgrading Irregular Settlement The Community Response. World Development. Vol.12.No.8 page 769-782.
- Hall, antonyet al. 1986. Community Participation, Social Development and State. London: Methven.
- Hasan.2002. Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hasan.2002. Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Himawan Arif Sutanto. 2008, Pengelolaan Mangrove Sebagai Pelindung Kawasan Pantai Dengan Pendekatan Co-management dan Analysis Hierarchy Process (AHP).
- Jose Maria Da Conceicao Freitas. Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya. (Program Magister Ilmu administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email : josemaria@yahoo.com).
- Lee F, Yok Shiu. 1994. Community Based Urban Environmental Management: Local NGOs as Calalys. Regional Development Dialogue. Autumn.Vol.15.No.2.
- Liedewij van Breugel. 2013, Community Based Tourism; Local Participatio and Perceived Impact A Comparative Study Between Two Community in Thailand.
- Mufti Nafi'atut Drajat. 2014, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Taman Nasional Baluran, (Studi pada Masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
- Moleong, Lexy. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moehaji, Noeng. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin
- M.Subana dan Sudrajat. 2001, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka setia.
- Nasution.2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Narbuko,C. dan Abu Achmadi, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta:P.T. Bumi Aksara.
- Nasution.2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nazir, Mohamad.1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Nurul Huda. 2008, Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pasca sarjana Universitas Diponegoro SEMARANG. 2008.
- Rumila Dewi. 2013, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali.
- Sevilla,Consuelo, et al., Alih Bahasa Tuwu Alimudin,1993, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Penerbit UI Press.
- Sugiyono.2004. Metode Penelitian Administratif.Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisataaan.
- Permendagri No.8 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan ,Draft Keempat Januari. 2003. Subdit Peran Masyarakat Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah.
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Arie Sanyi Email : ariesanyi@gmail.com Counsellor : Firdaus Yusrizal, M.Par Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761- 63277.
- Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi Tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo) Dian Kurnia Pribadiningtyas, Abdullah Said, Mochamad Rozikin Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang Email : dianntyaz@gmail.com urnal Administrasi Publik (JAP).
- Wiyanto (pada Workshop Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek,2004) Takashi Inoguchi, Edward Newman et al. 2001. Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, Pengantar: Eko Budihardjo. Jakarta: LP3ES.
- William, W.Cris.1997. Partnership,Power and Participation.The United Nation Center for Human Sattlement. Vol.3. No.5 March.
- William, A.M., and Gareth S.,1991, Tourism and Economic Development. Western European Experiences. New York: Second Edition . John Wiley& Sons.
- Wells, M., Brandon,K.1and Hannah,L. 1992. People and Parks.Linking Protected Area Management with Local Communities. Washington,D.C: World Bank/WWF/USAID.
- Warsito, Utomo. 1997. Peranan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 1.